

SISTIM UPAH DAN HUBUNGAN PRODUKSI
PADA PEMANENAN HUTAN RAKYAT DI KECAMATAN
MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

JUNITA MARTHEN
M 111 04 054



28 - 01 - 09
Kehutanan
Filsafat
H
12
Skr - KH 09
MAR
S

PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Sistim upah dan Hubungan Produksi pada
Pemanenan Hutan Rakyat di Kecamatan
Mengkendek Kabupaten Tana Toraja
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama : Junita Marthen

NIM : M 111 04 054

Program Studi

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Kehutanan

Pada
Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Dr. Ir. H. Muh. Dassir, M.Si

Pembimbing II


Dr. Ir. Iswara Gautama, M.Si

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin


Ir. Budirman Bachtiar, MS
NIP. 131 570 887

Tanggal Lulus : Januari 2009

ABSTRAK

JUNITA MARTHEN (M111 04 054) Sitem Upah dan Hubungan Produksi pada Pemanenan Hutan Rakyat di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan di bawah bimbingan Bapak Muh. Dassir dan Bapak Iswara Gautama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem upah tenaga kerja dan karakteristik hubungan produksi pada pemanenan hutan rakyat di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat maupun pihak-pihak terkait mengenai hubungan produksi yang terjadi dalam pemanenan hutan rakyat dan sebagai pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengelolaan hutan rakyat.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2008 pada hutan Pinus rakyat. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui cara pengamatan langsung di lapangan mengenai teknik pemanenan yang meliputi penebangan, pembagian batang, pengupasan, pengeringan, penyaradan dan pengangkutan. Wawancara mengenai pola pemanenan hutan rakyat, alat produksi pemanenan, penerimaan seluruh pelaku pemanenan hutan rakyat, sistem upah, dan batas sosial hubungan produksi.

Hasil penelitian menunjukkan sistem upah, yang diterapkan petani dan pengusaha pemanen kayu hutan rakyat di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja adalah metode upah satuan. Karakteristik hubungan produksi dari cara produksi komersial yang terjadi di pemanenan hutan rakyat Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja menyangkut batas sosial hubungan produksi adalah keluarga domestik dan keluarga inti-luas yang terjadi antara pengusaha, pemilik lahan, pemilik faktor produksi, tenaga kerja pengupas, penyarad dan muat bongkar. Struktur hubungan produksi secara pseudo-hirarkis dan sifat hubungan produksi non eksploitatif.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr.Ir. H. Muh. Restu, MP** Selaku Dekan Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Dr. Ir. H. Muh. Dassir, M. Si** dan Bapak **Dr. Ir. Iswara Gautama, M. Si**, selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya demi penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Daud Malamassam, M. Agr, Ir. M. Asar Said Mahbub, MP** dan Ibu **Ir. St Nuraeni, MP**, selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan koreksi demi penyempurnaan skripsi ini.

4. Bapak **Yunus Taruk** beserta seluruh staff PT. Nelly Jaya Pratama yang telah banyak membantu pada pelaksanaan penelitian di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.
5. Secara khusus kepada kedua orangtua, Ayahanda **Marthen** dan Ibunda **Maria Sumanggi** serta saudaraku tercinta **Oktavianus, Ishak Adi Chandra** dan **Normayanti** yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan selama penulis melaksanakan studi.
6. Sahabat-sahabatku : **Rezki Yani, Jeane P., Marwah H., Sari Gusti, Junita B.P., Soeharni AP., Herini Pratiwi, Yunita S.A., Alpin P., Jeniati, Bayu Anggi, Indrawan, Muh. Syawal, Musafier R., Harzen P., Dance T. L.,** Serta rekan-rekan **Rimbawan/ti Unhas** tanpa terkecuali atas kebersamaannya selama penulis melaksanakan studi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan karena ketebatasan penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan-masukan berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan semua pihak yang membutuhkannya. Terima Kasih.

Makassar, Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

No.	Teks	Halaman
	HALAMAN JUDUL	i
	HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
	ABSTRAK	iii
	KATA PENGANTAR	iv
	DAFTAR ISI	v
	DAFTAR TABEL.....	vi
	DAFTAR GAMBAR	vii
	DAFTAR LAMPIRAN	viii
I.	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	4
II.	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Hutan Rakyat	5
	B. Pengusahaan Hutan	6
	C. Pemanenan	7
	D. Kegiatan-Kegiatan Pemanenan Hasil Hutan.....	7
	E. Tenaga Kerja	12
	F. Pendapatan	13
	G. Sistem Upah	14
	H. Hubungan Produksi.....	16

III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat	19
B. Populasi dan Sampel	19
C. Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data	19
D. Analisis Data	21
E. Konsep Operasional	23
IV. KEADAAN UMUM LOKASI	
A. Keadaan Umum Lokasi	
1. Letak dan Luas	24
2. Topografi	24
3. Iklim	24
B. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya	
1. Penduduk	27
2. Mata Pencaharian	28
3. Perhubungan.....	29
C. Pola Penggunaan Lahan	29
D. Hasil Cruising Hutan Rakyat.....	30
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kegiatan Pemanenan Kayu	31
B. Sistem Upah.....	32
C. Penerimaan.....	34
D. Cara Produksi Komersial dan Hubungan Produksi.....	38
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Data Curah Hujan Rata-rata Bulanan Selama Sepuluh Tahun Terakhir (1997 – 2006) di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja	25
2.	Jumlah Bulan Basah, Bulan Lembab, dan Bulan Kering Selama Sepuluh Tahun Terakhir di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja (1997-2006)	26
3.	Luas Desa, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja	27
4.	Jenis Pekerjaan Penduduk di Kecamatan Mengkendek	28
5.	Jenis Penutupan Lahan Kecamatan Mengkendek	29
6.	Rekapitulasi Hasil Cruising Hutan Rakyat di Kecamatan Mengkendek Tahun 2008.....	30
7.	Harga Jual Kayu yang Ditawarkan Industri Finir PT. Nelly Jaya Pratama kepada Petani atau pengusaha.....	33
8.	Penerimaan Seluruh Pelaku Kegiatan Pemanen Hutan Rakyat di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.....	34
9.	Hasil Panen Log Pinus dari 10 Pemanen Kayu Hutan Rakyat Selama Setahun di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.....	37
10.	Hubungan Produksi dalam Pemanenan Kayu Hutan Rakyat di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.....	43

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Kerangka Analisis Penelitian	22
2.	Pola 1 Hubungan Produksi	38
3.	Pola 2 Hubungan Produksi	39
4.	Pola 3 Hubungan Produksi	39
5.	Pola 4 Hubungan Produksi	40
6.	Pola 5 Hubungan Produksi	40
7.	Pola 6 Hubungan Produksi	40

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks	Halaman
1.	Kuisisioner Penelitian	
2.	Pendapatan Pemilik petani hutan rakyat yang sewa chainsaw dan truk	
3.	Pendapatan Pemilik petani hutan rakyat yang memiliki chainsaw dan truk	
4.	Pendapatan Pengusaha yang menyewa chainsaw dan truk	
5.	Pendapatan Pengusaha yang memiliki chainsaw dan menyewa truk	
6.	Pendapatan Pengusaha yang memiliki truk dan menyewa chainsaw	
7.	Pendapatan Pengusaha yang memiliki chainsaw dan truk	
8.	Dokumentasi	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah No. 34/2002, kapasitas izin industri primer hasil hutan tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari dan sumber bahan baku industri primer hasil hutan selain dari hutan alam, dapat pula berasal dari hutan tanaman, hutan hak dan hasil dari perkebunan berupa kayu. Secara nasional, saat ini sebagian besar industri kehutanan masih bertumpu pada bahan baku kayu dari hutan alam, sedangkan kemampuan produksi kayu dari hutan alam menurun sehingga terjadi kesenjangan kemampuan pasokan bahan baku kayu dengan kebutuhan industri.

Perkembangan pembangunan kehutanan menuntut untuk memperhatikan dan memperhitungkan keberadaan hutan rakyat. Hutan rakyat sebagai salah satu pengelolaan hutan dapat memberikan banyak manfaat bagi pemiliknya, diantaranya sebagai penghasil kayu bakar, kayu pertukangan dan untuk bahan baku industri baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk dipasarkan. Tujuan pengelolaan hutan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan nilai sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemanenan hasil hutan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk memperoleh kayu dan hasil hutan lainnya dalam jumlah maksimum, hal ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan sehingga dapat menjamin kelestarian sumber daya hutan. Dalam kegiatan pemanenan kayu hutan rakyat terdapat tenaga kerja yang

dibayar dengan sistem upah serta berasal dari dalam dan luar lingkungan keluarga dari pemilik lahan dan pengusaha pemanenan kayu hutan rakyat. Hubungan produksi antara pemilik lahan dan pengusaha pemanenan kayu dapat bersifat eksploitatif (satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan) atau bersifat egaliter (kedua belah pihak diuntungkan). Hubungan produksi tersebut membentuk sistem perdagangan kayu, yakni pemilik lahan menjual kayu kepada pengusaha pemanen kayu yang kemudian menjualnya ke industri.

Kabupaten Tana Toraja memiliki areal hutan rakyat seluas 77.154,22 Ha, yang terdiri atas hutan bambu murni dan hutan bambu campuran masing-masing seluas 5.897,15 Ha dan 10.890,40, Hutan Kebun campuran seluas 47.154,22 Ha dan Hutan Pinus murni seluas 12.510,40 Ha. Khusus di Kecamatan Mengkendek, terdapat areal hutan rakyat seluas 7.722,80 Ha, yang terdiri atas hutan bambu murni dan hutan bambu campuran masing-masing seluas 143,00 Ha dan 246,75 Ha, Hutan Kebun campuran seluas 4.630,50 Ha dan Hutan Pinus murni seluas 2.702,55 Ha (Dinas Kehutanan Tana Toraja, 2005). Kecamatan Mengkendek merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tana Toraja yang memiliki potensi hutan rakyat yang dapat diperhitungkan. Salah satu potensi tegakan yang dapat dilihat secara nyata adalah tersedianya bahan baku yang cukup banyak untuk industri finis yaitu potensi tegakan pinus (*Pinus merkusii*). Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Mengkendek memanen kayu dari hutan rakyat sebagai mata pencaharian untuk menambah pendapatan mereka. Kayu-kayu tersebut mereka jual kepada industri yang dekat dengan lokasi pemanenan yang mereka lakukan yaitu kepada PT. Nelly

Jaya Pratama. Namun, para pemanen kayu tersebut belum mengetahui dengan pasti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan setiap kali melakukan kegiatan pemanenan dan pendapatan dari hasil penjualan kayu tersebut.

Penjualan kayu hutan rakyat di Kecamatan Mengkendek dijual dalam bentuk tegakan atau dalam bentuk sortimen kayu kepada industri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem upah yang diterapkan oleh petani atau pengusaha pemanen kayu terhadap tenaga kerja mulai dari penebangan sampai pengangkutan berdasarkan kekerabatan dan faktor produksi yang dimiliki. Apakah besar upah tenaga kerja atas dasar satuan waktu tertentu, jumlah produk yang dihasilkan atau setiap unit barang yang dijual serta adakah perbedaan sistem upah sesuai dengan perbedaan batas sosial.

Permasalahan yang kurang menguntungkan diantara pelaku usaha pemanenan hutan rakyat, salah satunya menyangkut hubungan produksi. Hubungan produksi tersebut menyangkut hubungan kerja sama atau pembagian kerja antara pemilik modal, pemilik hutan rakyat dan tenaga kerja yang terlibat dalam proses pemanenan. Hubungan-hubungan produksi tersebut diindikasikan terjadi bukan hanya ditentukan oleh tingkat perkembangan kekuatan produksi dan struktur kelas yang tercipta dalam masyarakat, melainkan juga oleh tuntutan efisiensi produksi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik hubungan produksi.

B. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui sistim upah tenaga kerja pada pemanenan hutan rakyat
2. Mengetahui penerimaan semua pelaku pemanen hutan rakyat di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dari hasil produksi.
3. Mengetahui karakteristik hubungan produksi pemanenan hutan rakyat yang berciri :
 - a. Batas sosial hubungan produksi menyangkut unsur/komponen sosial yang terjadi pada seluruh pelaku pemanenan hutan rakyat.
 - b. Struktur hubungan produksi apakah bersifat hirarki atau non hirarkis yang berlaku pada kegiatan pemanenan.
 - c. Sifat hubungan produksi yang terjadi dalam kegiatan pemanenan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat maupun pihak-pihak terkait mengenai hubungan produksi yang terjadi dalam pemanenan hutan rakyat dan sebagai pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengelolaan hutan rakyat

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan Rakyat

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa hutan berdasarkan statusnya diklasifikasikan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat. Hutan adat dan hutan negara yang dikelola oleh desa disebut hutan desa, serta hutan negara yang manfaat utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan, sedangkan hutan yang tumbuh atau dibangun oleh rakyat di atas tanah milik dengan jenis-jenis tanaman hutan disebut hutan rakyat (Departemen Kehutanan, 1999).

Hutan rakyat adalah suatu lapangan di luar kawasan hutan negara yang ditumbuhi oleh pohon-pohon dengan berbagai rupa sehingga secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya dan lahannya yang dimiliki oleh rakyat. Anggapan masyarakat selama ini terhadap hutan rakyat hanya produksi kayu saja, padahal apabila diusahakan dengan pola yang baik, hutan rakyat mempunyai fungsi dan nilai yang lebih tinggi (Kusumedi, 2003).

Suharjito dkk (2000), berdasarkan jenis tanamannya dan pola penanamannya, hutan rakyat dibagi atas :

1. Hutan rakyat murni, yaitu hutan rakyat yang terdiri dari suatu jenis tanaman pokok yang ditanamkan dan diusahakan secara homogen atau monokultur.

2. Hutan rakyat campuran, yaitu hutan rakyat yang terdiri dari berbagai jenis pohon-pohon yang ditanam secara campuran.
3. Hutan rakyat sistem agroforestri tumpang sari, yaitu hutan rakyat yang mempunyai bentuk usaha tani lainnya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain secara terpadu pada suatu lokasi.

B. Pengusahaan Hutan

Pengusahaan hutan adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang didasarkan atas azas kelestarian fungsi dan azas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil dan pemasaran hasil hutan. Tujuan pengusahaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan adalah mewujudkan keberadaan sumberdaya hutan yang berkualitas tinggi, memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan ekologi yang maksimal dan lestari serta menjamin distribusi manfaatnya secara adil dan merata khususnya terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan (Tempointeraktif, 2004).

Sekjen Departemen Kehutanan (2006), tata usaha kayu rakyat adalah kegiatan yang meliputi sesuai dengan permenhut No. P. 55/Menhut-II/2006 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, bahwa tata usaha kayu adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan. Khusus untuk kayu rakyat telah diatur dalam permenhut P.51/Menhut/II/2006 tanggal 10 juli 2006 tentang

penggunaan surat keterangan asal usul (skau) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang dikenal salah satunya hutan hak milik atau hutan rakyat.

C. Pemanenan

Pemanenan hasil hutan adalah semua kegiatan atau pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyiapan pohon atau kayu yang masih berdiri sehingga dapat dibawa keluar dari areal hutan baik yang berupa kayu utuh, maupun berupa potongan kayu. Pemanenan hasil hutan merupakan kegiatan terakhir dan kunci yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu maksud dari pengusaha hutan berupa kayu maupun non kayu (Wackerman, 1949).

Suhartana dan Dulsalam (1994), menyatakan bahwa pemanenan kayu atau eksploitasi hutan terdiri dari sederetan elemen kegiatan dan secara keseluruhan mempunyai sasaran untuk mengubah pohon yang terdapat dalam hutan menjadi dolok dan atau bentuk lain agar dapat dipindahkan ke tempat pengolahan atau tempat penjualan secara langsung sehingga bermanfaat bagi kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini akan berbenturan langsung dengan keberadaan vegetasi dalam hutan yang bersangkutan.

D. Kegiatan-Kegiatan Pemanenan Hasil Hutan

1. Penebangan

Penebangan adalah kegiatan pengambilan kayu dari pohon-pohon dalam tegakan yang berdiameter sama dengan atau lebih besar dari diameter batas yang

ditentukan (Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999). Penebangan dilakukan sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin hasil kayu yang maksimal serta membatasi kerusakan-kerusakan kayu hasil penebangan dan kerusakan permukaan tanah. Untuk keperluan tersebut, yang perlu dipersiapkan antara lain arah rebah yang tepat, pelaksanaan penebangan tinggi tonggak yang serendah-rendahnya, pembagian batang, penyaradan, pengupasan kulit, dan pengangkutan kayu dari tempat pengumpulan kayu (TPn) ke tempat penimbunan kayu (TPk) (Departemen Kehutanan, 2002)

Penebangan adalah kegiatan menebang pohon yang telah memenuhi syarat masa tebang dalam suatu areal hutan, maksud dari kegiatan penebangan adalah melaksanakan suatu pemanfaatan kayu secara optimal dari blok rencana yang telah diusahakan dalam pengusahaan hutan terhadap pohon yang diameternya lebih besar dari diameter yang telah ditentukan dan meminimalkan kerusakan terhadap tegakan tinggal (Lukito, 1990).

2. Penyaradan

Kegiatan yang dilakukan setelah penebangan adalah penyaradan kayu dari tempat penebangan ke tempat pengumpulan kayu (TPn), yaitu tempat pengumpulan kayu bersifat sementara sebelum diangkut ke tempat penimbunan kayu (TPk). Penyaradan dapat dilakukan secara tradisional dengan tenaga hewan maupun secara mekanis dengan menggunakan traktor, atau sistem kuda-kuda di hutan rawa. Penyaradan kayu hasil penebangan dilakukan setelah bagian tajuk pohon dipotong. penyaradan kayu harus melalui jalan darat yang telah dibuat terlebih dahulu.

Penyaradan dimulai pada saat kayu diikatkan pada rantai atau tali penyaradan di tempat penebangan, kemudian di sarat ke TPn atau ke tepi sungai, ke tepi jalan mobil atau jalan locomotif dan terak setelah rantai atau penyarad dilepas dari kayu yang telah disarad (Departemen Kehutanan, 2002).

Suhartana dan Dulsalam (1994), menyatakan bahwa penyaradan kayu merupakan salah satu elemen kegiatan dari serangkaian kegiatan pemanenan kayu. Dalam pelaksanaannya, betapapun kegiatan tersebut dilaksanakan secara hati-hati, namun kerusakan terhadap vegetasi dan tanah yang timbul karenanya tidak mungkin dihindari. Penyaradan kayu di luar Jawa umumnya menggunakan alat penyarad traktor.

Tenaga yang digunakan dalam kegiatan penyaradan menurut, Sastrodimedji (1975) dalam Lukito (1990), membagi sistem penyaradan sebagai berikut :

- a. Penyaradan dengan tenaga manusia tanpa peralatan, mengguling, kuda-kuda dan pemikulan.
- b. Penyaradan dengan menggunakan tenaga manusia dibantu peralatan non mekanis, misalnya lori, penyaradan dengan gaya berat.
- c. Penyaradan dengan hewan, misalnya dengan kuda, sapi, kerbau dan gajah.
- d. Penyaradan dengan alat-alat mekanis, misalnya traktor, sistem kabel.

3. Pembagian Batang

Pembagian batang dilakukan pada pohon yang telah rebah, kemudian dibersihkan cabang-cabang, ranting-ranting dan benjolan-benjolan yang ada pada pohon rebah tersebut. Setelah itu dilakukan pembagian batang dan pengupasan kulit.

Terhadap kayu yang mudah terserang jamur biru dan kumbang ambrosia tidak perlu dikupas kulitnya. Pembagian batang dilakukan dengan memperhatikan azas peningkatan kayu dan peruntukannya. Bagian bontos batang atau ujung-ujung batang dipotong rata dan tegak lurus. Kayu bulat yang mudah diserang jamur atau serangga penggerek, harus segera diawetkan antara lain dengan cara dilabur atau disemprot dengan pestisida (insektisida/fungisida). Kayu bulat yang tidak dikuliti harus dilabur pada kedua bontosnya (Departemen Kehutanan, 2002).

Pembagian batang biasanya dilakukan ditempat penebangan. Bila seluruh panjang pohon diangkut, maka pembagian batang adalah untuk membuat sortimen-sortimen yang dapat digergaji menjadi kayu gergajian dengan kualitas maksimum. Pekerjaan ini meliputi pemotongan batang menjadi log-log pengupas kulitnya atau mengerjakan menjadi balok. Pembagian batang sangat menentukan nilai yang dapat diperoleh dari suatu batang (Rostiati, 1990).

Departemen Kehutanan (1996), faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembagian batang adalah :

- 1) Keadaan pohon/batang.
- 2) Sortimen yang diminta/ dipesan oleh konsumen.
- 3) Kapasitas alat sarad/alat angkut

Adapun tahap-tahap dalam pembagian batang (*bucking*) :

- a. Pembersihan cabang (*limbing*) dan pangkal.
- b. Pemotongan ujung (*topping*)
- c. Pembagian batang (*bucking*)

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan :

- a) Kapasitas alat sarad
- b) Sortimen yang diminta industri/pasar
- c) Adanya cacat (bengkok, kena penyakit/hama)
- d) Adanya pesanan khusus
- e) Pelaksanaan pembagian batang harus memperhatikan posisi batang

4. Pengangkutan Kayu

Pengangkutan kayu adalah kegiatan memindahkan kayu yang telah dipotong-potong sesuai sortimen yang dikehendaki, dari TPn ke TPk dengan menggunakan alat angkut truk atau alat angkut lainnya selanjutnya ke tempat tujuan penjualan. Pengangkutan meliputi kegiatan pemuatan dan pembongkaran. Pemuatan merupakan kegiatan menaikkan kayu di TPn ke atas truck untuk diangkut ke TPk atau tempat penyimpanan kayu bulat, sedangkan pembongkaran kayu adalah kegiatan menurunkan kayu dari atas alat angkut ke TPk, atau tempat penyimpanan. Sistem pengangkutan dipengaruhi oleh letak dan topografi lapangan, geologi, tanah dan iklim, luas areal, volume dan ukuran kayu, serta kondisi jalan, jenis prasarana angkutan, jarak dan biaya angkutan (Departemen Kehutanan, 2002).

Anderson dan Smith (1976) dalam Rahayu (1994), menyatakan bahwa pemuatan adalah kegiatan mengangkut log atau potongan kayu dari tanah dan menempatkannya ke truck atau trailer. Hal ini dikerjakan dengan seksama agar muatan selama kegiatan pengangkutan membentuk muatan yang kompak. Potongan

kayu *pulpwood* yang kecil dimuat dengan tangan, log yang besar dimuat dengan *drum-powered cable, hydraulic crane, front and hydraulic loaders, large cable cranes* dan kabel yang dipasang pada taraktor skidder.

E. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah salah satu input sebagai faktor produksi selain mesin, bahan baku dan energi. Faktor-faktor produksi ini secara sendiri-sendiri disebut dengan produktivitas parsial. Untuk istilah tenaga kerja sering pula disebut produktivitas tenaga kerja. Orang yang tepat dengan pekerjaan yang tepat serta kondisi yang memungkinkan mereka bekerja optimal (Umar, 1998).

Artoyo (1986), membagi tenaga kerja ke dalam beberapa jenis yaitu :

1. Tenaga kerja kasar (umum) adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau berpendidikan minimum dengan bekal latihan seadanya.
2. Tenaga kerja berpendidikan atau siap pakai (khusus) adalah tenaga kerja yang mewakili tingkat pendidikan tinggi atau tambahan pendidikan yang dipergunakan melalui kriteria kerja.
3. tenaga kerja berpengalaman (terampil) adalah tenaga kerja yang disamping mewakili pendidikan tinggi juga memiliki pengalaman kerja yang mapan.

Soekarwati (1990), mengemukakan faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja tetapi juga kualitas dan macam tenaga kerja perlu pula diperhitungkan.

F. Pendapatan

Subroto dan Hariadi (1984), mengemukakan bahwa pendapatan adalah kelebihan penghasilan dari seluruh total biaya dan kerugian-kerugian yang terjadi pada suatu periode tertentu, baik yang termasuk operasi maupun non operasi. Jika biaya melebihi jumlah penghasilan (*revenue*), maka akan terjadi kerugian.

Pendapatan atau *income* dari seorang warga masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Kemudian sektor produksi ini membeli faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar faktor produksi (Fauzi, 1995).

Soekartawi (1991), pendapatan adalah selisih antara biaya yang dikeluarkan dengan penerimaan yang diperoleh. Pendapatan tersebut dibedakan atas dua macam yaitu :

1. Keuntungan (*Net Farm Income*)

Keuntungan adalah selisih antara pendapatan kotor dengan total biaya yang digunakan selama proses produksi. Pendapatan bersih ini merupakan gambaran nilai keuntungan yang diperoleh petani dalam menghasilkan kegiatan usaha taninya.

2. Pendapatan Kotor (*Gross Farm Income*)

Pendapatan kotor adalah nilai hasil produk total usaha tani dalam jangka waktu tertentu baik yang tidak dijual maupun yang dijual.

G. Sistem Upah

Swastha dan Ibnu (1988), perusahaan dalam melakukan pengupahan kepada buruh/karyawan dapat memakai beberapa metode. Berikut ini adalah metode-metode yang bisa dilakukan oleh perusahaan.

1. Upah langsung

Bentuk pembayaran diwujudkan dalam bentuk sejumlah uang yang dibayarkan atas dasar satuan waktu tertentu, harian, mingguan, bulanan dan bahkan tahunan. Metode ini, biasanya tidak termasuk upah lembur.

2. Gaji

Dasar pembayaran metode upah ini adalah lama waktu mengerjakan suatu pekerjaan, atau dihitung menurut tingkat upah per jam, tanpa memperhatikan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. Upah lembur diperhitungkan dalam metode ini. Dasar perhitungan upah lembur adalah kelebihan jam kerja buruh di atas jam kerja normal mereka. Umumnya 1 hari dihitung 8 jam kerja dan 1 minggu dihitung 40 jam kerja.

3. Upah satuan

Pada metode ini upah dibayarkan kepada para karyawan menurut jumlah produk yang dihasilkan. Biasanya perusahaan menjamin adanya tingkat upah minimum. Metode upah semacam ini dapat mendorong karyawan untuk membuat barang dalam jumlah yang besar, sehingga sering berakibat rendahnya kualitas barang.

4. Komisi

Merupakan sejumlah uang yang dibayarkan (biasanya didasarkan atas persentase dan harga jual) untuk setiap unit barang yang terjual, dan bukannya unit yang dapat diproduksi.

5. Premi shift kerja

Merupakan upah yang diberikan kepada para karyawan karena bekerja di luar jam kerja normal. Upah semacam ini biasanya diberikan kepada para karyawan pabrik yang bekerja 24 jam sehari, yang dibagi menjadi 3 shift, yaitu : pagi, sore dan malam hari, dengan maksud supaya mereka yang terkena giliran bekerja di luar jam kerja normal. Premi shift ini biasanya lebih tinggi daripada tarif upah biasa.

6. Tunjangan tambahan Untuk menarik supaya karyawan bersedia bekerja di perusahaan dalam waktu yang lama, sering memberikan tunjangan tambahan di luar upah yang biasanya mereka terima, seperti : asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, tunjangan hari raya, hari libur, cuti, pesangon, kendaraan, perumahan, dan pensiun.

Swastha dan Ibnu (1988), mengemukakan besar kecilnya tingkat upah bagi buruh, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pasar tenaga kerja

Besar kecilnya tingkat upah, bagi buruh dipengaruhi oleh mekanisme penawaran dan permintaan tenaga kerja. Apabila di suatu daerah terdapat permintaan tenaga

kerja sedangkan jumlah yang tersedia sedikit maka tingkat upah akan tinggi.

Apabila terjadi sebaliknya, maka tingkat upah rendah.

2. Tingkat upah yang berlaku di daerah yang bersangkutan
3. Tingkat keahlian yang diperlukan
4. Situasi laba perusahaan
5. Peraturan pemerintah.

H. Hubungan Produksi

Proses produksi guna memenuhi kebutuhannya manusia berhubungan dengan manusia lain, dimana proses produksi merupakan hasil hubungan antar manusia, maka sifat dari produksi juga selalu bersifat sosial. Hubungan antar manusia dalam suatu proses produksi disebut sebagai hubungan sosial produksi, dimana dalam sebuah masyarakat bisa bersifat kerja sama atau bersifat penghisap. Hal ini tergantung siapakah yang memiliki atau menguasai seluruh alat-alat produksi (alat-alat kerja dan obyek kerja). Hubungan sosial produksi dan tenaga produktif (alat-alat produksi dan tenaga kerja) inilah kemudian membentuk suatu cara produksi dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi dari suatu cara produksi tertentu ke cara produksi yang lain terjadi akibat berkembangnya tenaga produktif dalam suatu masyarakat yang akhirnya mendorong hubungan produksi lama tidak dapat dipertahankan lagi dan menuntut adanya hubungan produksi baru. Inilah hukum dasar sejarah masyarakat dan merupakan sumber utama dari semua perubahan sosial yang ada (Berkah, 2002)

Posisi dan hubungan proses dengan alat-alat produksi inilah, masyarakat kemudian terbagi kedalam kelompok-kelompok yang disebut kelas-kelas. Dalam setiap masyarakat berkelas yang selalu didapati adanya pengambilan/perampasan atas hasil produksi. Perampasan atas hasil produksi inilah yang kemudian sering dinamakan dengan penghisapan. Mulai dari masa perbudakan, feodalisme sampai kapitalisme selalu terdapat dua kelas utama yaitu budak dengan pemilik budak/bangsawan pemilik tanah dengan kaum hamba/kelas kapital dengan buruh. Dari ketiga masa ini selalu terbentuk kelas yang menguasai dan kelas yang dikuasai (Berkah, 2002).

Hubungan produksi adalah hubungan kerjasama atau pembagian kerja antara manusia yang terlibat dalam proses produksi, yakni struktur pengorganisasian sosial produksi, seperti hubungan antara pemilik modal dan pekerja. Hubungan-hubungan produksi tersebut bukan hanya ditentukan oleh tingkat perkembangan kekuatan produksi dan struktur kelas yang tercipta dalam masyarakat, melainkan juga oleh tuntutan efisiensi produksi (Suseno, 1999).

Sitorus (1999), dalam studinya menganalisis hubungan produksi dalam masyarakat petani minangkabau cara produksi yang hadir dalam masyarakat tersebut terdiri atas tiga, yaitu:

- a. Cara produksi subsisten yakni batas sosial hubungan produksi hanya menyangkut keluarga inti, struktur hubungan sosialnya bersifat egaliter dalam arti tidak mengenal struktur hirarkis "atasan –bawahan" atau "majikan-buruh", dan sifat hubungan produksi bersifat kerjasama.

- b. Cara produksi komersialis yakni usaha yang sudah berorientasi pasar dengan batas sosial hubungan produksi menyangkut ikatan keluarga dan sifat hubungan produksi menunjuk pada gejala eksploitasi surplus melalui ikatan kekerabatan, sedangkan struktur hubungan produksi antara pekerja bersifat egaliter tetapi kompetitif
- c. Cara produksi kapitalis yaitu usaha padat modal berorientasi pasar dimana batas sosial hubungan produksi adalah suatu unit perusahaan sosial dan struktur hubungan sosial bersifat struktur hirarkis sehingga sifat hubungan produksi bersifat eksploitatif. Surplus produksi pada perusahaan-perusahaan kapitalis itu diserap oleh majikan sebagai pemilik modal.

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2008. Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik lahan hutan rakyat dan pelaku usaha pemanenan hutan rakyat di Kecamatan Mengkendek. Penentuan sample penelitian dilakukan secara purposive sampling sebanyak 10 responden, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Sedang atau telah melakukan pemanenan hutan rakyat
2. Melakukan pemanenan dengan menggunakan tenaga kerja penebangan, penyaradan, dan tenaga kerja pengangkut
3. Hasil pemanenan dijual ke industri

C. Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data

Data primer diperoleh dengan mengadakan observasi langsung di lapangan dan wawancara langsung dengan masyarakat, menyangkut :

1. Pola pemanenan hutan rakyat (penebangan, penyaradan, pembagian batang, dan pengangkutan kayu).
2. Jenis kayu yang dipanen.

3. penerimaan seluruh pelaku pemanenan hutan rakyat.
4. Sistem upah yang digunakan pemilik hutan rakyat dalam pengupahan tenaga kerja.
5. Batas sosial hubungan produksi menyangkut unsur/komponen sosial yang terjadi pada seluruh pelaku pemanenan hutan rakyat, meliputi pemilik lahan hutan rakyat, pemilik chain saw, tenaga kerja, dan pengusaha pemanen kayu hutan rakyat.
6. Struktur Hubungan produksi adalah tingkatan-tingkatan kelas yang terbentuk akibat adanya batas sosial hubungan produksi.
7. Sifat hubungan produksi adalah sifat yang terjadi terbentuk pada kelas-kelas produksi akibat adanya struktur hubungan produksi apakah sifat hubungan produksi bersifat egaliter yaitu saling menguntungkan, atau eksploitatif yaitu merugikan salah satu pihak.
8. Alat produksi pemanenan hutan rakyat menyangkut peralatan yang digunakan selama kegiatan pemanenan.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi dan laporan yang terkait dengan lingkup areal penelitian.

D. Analisis Data

1. Sistim pengupahan

Analisis data yang dilakukan dengan melihat sistim upah yang berlaku pada kegiatan pemanenan hutan rakyat di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Penerimaan

$$P = (Bn \times Pn)$$

Dimana :

P = Penerimaan (Rp/m³)

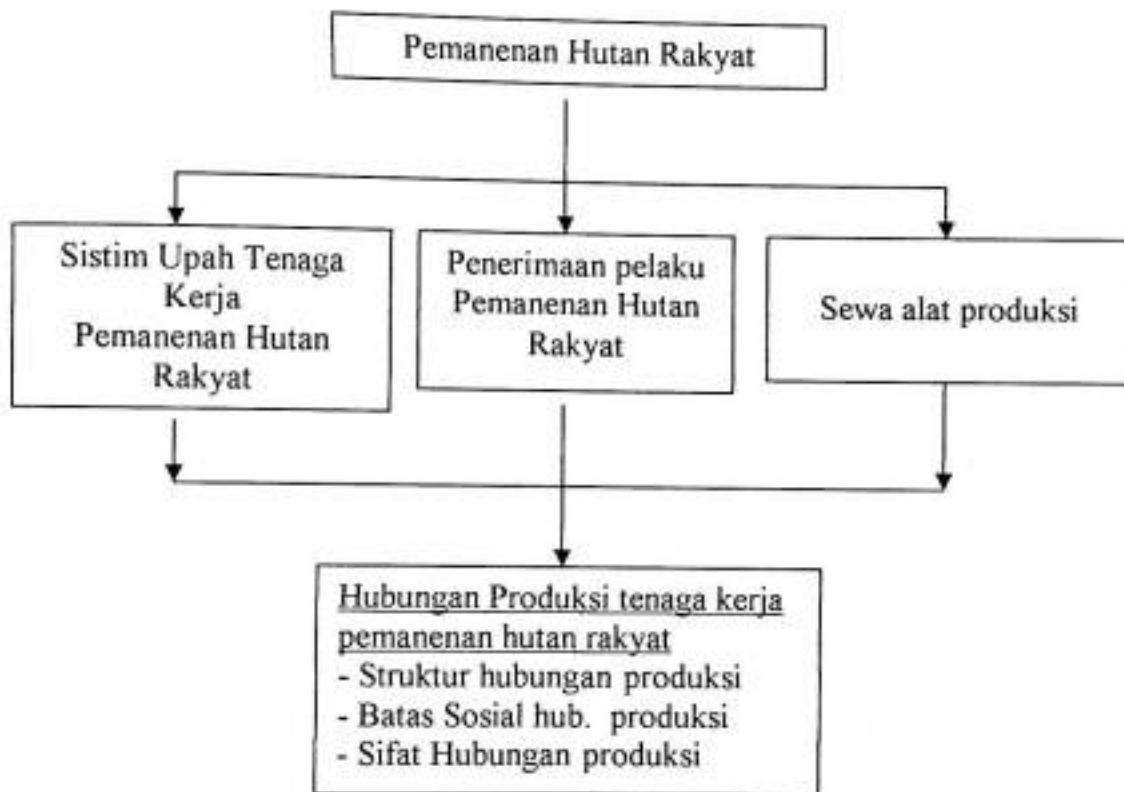
Bn = Harga Jual Kayu (Rp)

Pn = Jumlah Produksi Kayu (m³)

3. Hubungan produksi

Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan hubungan produksi menyangkut struktur hubungan produksi, batas sosial hubungan produksi dan sifat hubungan produksi.

Kerangka analisis pada penelitian ini diperlihatkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Analisis Penelitian

E. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan operasional dari beberapa istilah yang berhubungan dengan penelitian dan untuk menghindari kesalahpahaman mengenai pengertian dari istilah-istilah tersebut, maka berikut ini batasan pengertian dari beberapa istilah :

1. Hubungan Produksi adalah hubungan kerja sama atau pembagian kerja antar pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemanenan hutan rakyat.
2. Sistim upah tenaga kerja adalah sistim yang digunakan pemilik hutan rakyat dalam pengupahan tenaga kerja.
3. Batas sosial hubungan produksi adalah unsur/komponen sosial yang terjadi pada seluruh pelaku pemanenan hutan rakyat, meliputi pemilik lahan hutan rakyat, pemilik chain saw, tenaga kerja, dan pengusaha pemanen kayu hutan rakyat.
4. Struktur Hubungan produksi apakah bersifat non hirarkis antar anggota keluarga inti, pseudo-hirarkis antar anggota keluarga inti-luas, atau hirarkis antar majikan (pemilik modal dan buruh) dalam pemanenan hutan rakyat.
5. Sifat hubungan produksi adalah sifat hubungan produksi berbentuk kerjasama atau saling menguntungkan diantara pelaku yang terkait dalam pemanenan hutan rakyat atau sebaliknya bersifat eksploitatif.
6. Pemanen hutam rakyat yang dioprasikan adalah pemanenan kayu hutan rakyat.

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Fisik Lokasi

1. Letak dan Luas

Kecamatan Mengkendek secara administrasi pemerintahan berada dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja yang mempunyai luas 19.674 km² dengan batas-batas sebagai berikut

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sangalla dan Batualu
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Enrekang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Bonggakaradeng

2. Topografi

Keadaan topografi Kecamatan Mengkendek merupakan daerah pegunungan. Dari 17 Lembang/Desa yang ada, mempunyai topografi dataran tinggi dengan ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut.

3. Iklim

Keadaan iklim pada suatu daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan serta produksi tanaman. Salah satu faktor iklim yang sangat berperan terhadap pertumbuhan tanaman adalah curah hujan.

Mohr membagi tiga bulan berdasarkan derajat kebasahan dan kekeringan setiap bulannya, yaitu :

- Bulan Basah (BB), jika curah hujan setiap bulannya > 100 mm
- Bulan Lembab (BL), jika curah hujan setiap bulan antara $60 - 100$ mm
- Bulan Kering (BK), jika curah hujan setiap bulannya < 60 mm

Data curah hujan selama sepuluh tahun terakhir di Kecamatan Mengkendek dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Curah Hujan Rata-rata Bulanan Selama Sepuluh Tahun Terakhir (1997 - 2006) di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja

Bulan	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Januari	292	270	389	389	382	223	302	322	382	295
Pebruary	384	294	457	457	462	298	286	350	462	394
Maret	284	265	786	786	516	425	382	297	515	456
April	231	275	622	622	557	385	299	310	537	381
Mei	233	475	382	382	385	289	281	357	385	295
Juni	223	465	403	403	224	199	211	275	328	310
Juli	85	94	97	97	213	124	176	119	92	132
Agustus	55	57	59	59	53	68	97	57	59	49
September	39	47	109	109	63	53	62	49	62	57
Oktober	93	50	114	114	138	96	102	76	47	98
Nopember	139	380	358	358	279	107	86	158	78	169
Desember	442	294	640	640	560	227	256	107	559	278

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tana Toraja, 2007

Berdasarkan data Tabel 1, maka dapat ditentukan jumlah basah, bulan lembab, dan bulan kering dengan kriteria masing-masing sebagai berikut :

- Bulan basah, jika curah hujan > 100 mm
- Bulan lembab, jika curah hujan $60 - 100$ mm
- Bulan kering, jika curah hujan < 60 mm.

Nilai rata-rata bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering selama 10 tahun terakhir di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Bulan Basah, Bulan Lembab, dan Bulan Kering Selama Lima Tahun Terakhir di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja (1997-2006)

Tahun	Jumlah Bulan Basah	Jumlah Bulan Lembab	Jumlah Bulan Kering
1997	8	2	2
1998	8	1	3
1999	10	-	2
2000	10	1	1
2001	10	1	1
2002	10	1	1
2003	10	2	-
2004	11	-	1
2005	8	2	2
2006	9	1	2
Jumlah	94	11	15
Rata-rata	9,4	1,1	1,5

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tana Toraja, 2007

Dari Tabel 2, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata jumlah bulan basah 9,4, rata-rata bulan lembab 1,5 dan rata-rata bulan kering 1,1. Sehingga dari data tersebut dapat ditentukan nilai Q untuk mengetahui tipe iklim di Kabupaten Tana Toraja dengan rumus :

$$Q \text{ ratio} = \frac{\text{Rata-rata bulan kering}}{\text{Rata-rata bulan basah}} \times 100\%$$

$$= \frac{1,5}{9,4} \times 100\%$$

$$= 15,95 \%$$

$$= 15,95 \%$$

Penggolongan iklim berdasarkan Schmidt dan Fergusson, maka tipe iklim di Kecamatan Mengkendek termasuk dalam tipe iklim B dengan nilai Q ratio yang berkisar antara 14,3% – 33,3%.

B. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

1. Penduduk

Data kependudukan Kecamatan Mengkendek berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja disajikan pada Tabel 5.

Tabel 3. Luas Desa, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja

No	Desa / Lembang	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Uluway	19,21	1.119	268	58
2	Uluway Barat	29,12	969	199	33
3	Gasing	12,16	3.020	755	248
4	Marinding	9,24	1.804	453	195
5	Ke'pe Tinrong	6,60	1.646	326	249
6	Randan	6,21	2.562	443	110
7	Tampo	9,23	1.471	320	159
8	Simbuang	20,50	2.757	566	134
9	Lemo	10,96	1.734	409	158
10	Tengan	8,97	2.155	507	240
11	Rantedada	9,08	1.143	285	126
12	Pa'tengko	9,55	1.353	412	142
13	Rantekalua	10,67	2.775	726	260
14	Bantu Tangi	6,20	1.286	299	207
15	Buntu Datu	5,61	1.382	417	246
16	Palipu	5,91	1.559	308	264
17	Pakala	17,52	1.000	204	57
	Jumlah	196,74	29.735	6.897	151

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, 2007

Tabel 3 menunjukkan bahwa Kecamatan Mengkendek terdiri atas 17 Lembang/Desa dengan luas wilayah 196,74 km², jumlah penduduk 29.735 jiwa, jumlah rumah tangga 6.897 KK dan kepadatan penduduk 623 jiwa/km².

2. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian penduduk Kecamatan Mengkendek adalah sebagai petani, jasa, angkutan dan lain-lain dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jenis Pekerjaan Penduduk di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja

no	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1.776
2.	Jasa	17
3.	Angkutan dan Komunikasi	141
4.	Pedagang	230

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, 2007

Berdasarkan Tabel 4 di atas pada umumnya mata pencaharian penduduk di Kecamatan Mengkendek adalah bermata pencaharian di bidang petani sebanyak 1.776 orang, di bidang jasa sebanyak 17 orang, di bidang angkutan dan komunikasi sebanyak 141 orang, dan sebagai pedagang sebanyak 230 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat di Kecamatan Mengkendek, sehingga pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

3. Perhubungan

Lokasi penelitian dapat dicapai dengan kendaraan umum bermotor. Jalan Propinsi yang menghubungkan Makassar – Tana Toraja ke pinggir lokasi adalah jalan beraspal sampai ke Mengkendek. Jarak dari Makassar \pm 281 km, jarak dari Makale (ibu kota kabupaten) \pm 19 km.

C. Pola Penggunaan Lahan

Berdasarkan hasil survey terhadap penggunaan lahan di Kecamatan Mengkendek, diketahui bahwa pada umumnya lahan yang ada digunakan untuk pertanian, pekarangan dan kolam, tegalan dan kebun, hutan dan penggembalaan. Dalam hal ini lahan sebagai potensi sumber daya alam yang ada, sebagian besar diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan dan selebihnya merupakan areal hutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jenis Penutupan Lahan Kecamatan Mengkendek

No	Jenis Penutupan Lahan	Luas (ha)
1.	Sawah	1.636
2.	Pekarangan dan Kolam	908
3.	Tegalan dan Kebun	6.598
4.	Rawa-rawa dan Padang rumput	989
5.	Hutan	6.128
6.	Lain-lain	3.415
	Jumlah	19.674

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, 2007

D. Hasil Cruising Hutan Rakyat

Rekapitulasi hasil cruising hutan rakyat di Kecamatan Mengkendek tahun 2008 yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Cruising Hutan Rakyat di Kecamatan Mengkendek Tahun 2008.

No	Nama pemilik	Kode Pemi lik	Letak Astronomis	Jumlah Pohon (Batang)	Volume (m ³)
1	Andy Malissa	AM	03°15'24,8"LS-119°50'45,5"BT	78	108,11
2	Simon Sayo	SS	03°15'23,1"LS-119°50'49,8"BT	47	59,5
3	Danu indo nyamin	DIN	03°15'36,3"LS-119°50'50,2"BT	50	54,79
4	A.M. Sima	AMS	03°15'53,5"LS-119°50'51,6"BT	111	125,14
5	B.Minggu	BM	03°14'36,3"LS-119°50'39,2"BT	132	386,41
6	Y. Barondeng	YB	03°15'44,3"LS-119°51'01,7"BT	205	123,95
7	Gosi' Ne' Indo	G	03°15'34,6"LS-119°50'55,2"BT	100	119,63
8	Kadang Batto M.	KBM	03°15'18,3"LS-119°51'01,4"BT	117	170,2
9	U'da	U	03°15'15,2"LS-119°51'02,3"BT	175	278,02
10	Y. Doko	YD	03°15'24,9"LS-119°50'52,3"BT	109	110,25
11	M. Romon	MR	03°15'23,1"LS-119°50'49,8"BT	112	144,33
12	Taslim	T	03°15'44,3"LS-119°50'49,9"BT	216	372,66
13	Suleman Olsa	SO	03°15'53,5"LS-119°50'53,2"BT	128	102,84
14	Reje'je B	RB	03°14'39,7"LS-119°50'40"BT	237	329,32
15	Yohanis Jono	YJ	03°15'39,8"LS-119°50'50,4"BT	247	273,41
16	Ambe'Liu	AL	03°14'46,3"LS-119°50'55,7"BT	357	409,88
17	Onggo	O	03°14'36,3"LS-119°50'39,2"BT	457	140,27
18	Hendrik	H	03°14'54,1"LS-119°50'37,4"BT	743	750,06
19	Ori	O	03°11'44,1"LS-119°51'45,8"BT	201	172,45
20	Y. Sattu	YS	03°13'07,1"LS-119°54'06,9"BT	165	180,91
21	Benyamin Buren	BB	03°16'0,01"LS-119°50'57,0"BT	224	261,24
22	Jina Indo Senin	JIS	03°15'49,6"LS-119°51'18,7"BT	180	243,82
23	Nathan Ali	NA	03°15'53,5"LS-119°51'18,3"BT	357	404,27
24	Saru'bu ne'Batti	SNB	03°15'08,7"LS-119°50'23,0"BT	257	264,03
25	Benyamin K.	BK	03°14'14,8"LS-119°52'29,1"BT	198	138,26
26	Lukas	L	03°13'36,4"LS-119°52'05,4"BT	551	700,02
Jumlah				5.754	6.423,76
Total keseluruhan				13.608	12.969,85

Sumber : Dinas Kehutanan Tana Toraja, 2008

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kegiatan Pemanenan Kayu

Pemanenan hutan rakyat di Kecamatan Mengkendek dilakukan oleh petani pemilik hutan rakyat dan pengusaha pemanen kayu. Dimana pemilik lahan menjual kayu dalam bentuk tegakan kepada pengusaha yang memiliki modal pada kegiatan pemanenan, yang didasarkan atas kesepakatan bersama secara lisan. Begitu juga perjanjian dengan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pemanenan. Kegiatan pemanenan kayu pada hutan rakyat meliputi penebangan, pembagian batang, penyaradan dan pengangkutan. Di dalam kegiatan pemanenan pohon yang ditebang di atas diameter 25 cm, alat-alat produksi yang digunakan seperti chainsaw dijalankan oleh satu operator dan digunakan pada kegiatan penebangan sampai pembagian batang, untuk membersihkan ranting digunakan parang, kemudian pengupasan kulit dengan menggunakan *bilah* atau parang setelah itu dikeringkan, kegiatan ini dilakukan dengan bantuan sinar matahari. Setelah itu dilakukan penyaradan secara guling dan pikul oleh tenaga manusia. Kayu yang telah berada di tempat pengumpulan (TPn) biasanya dipinggir jalan kemudian diangkut ke tempat penimbunan (TPk) atau ke industri finir PT. Nelly Jaya Pratama. Dalam pengangkutan log tersebut semua pengurusan mengenai surat izin keterangan pengantar kayu dan pembayaran donasi hasil hutan kayu kepada Pemda Kabupaten Tana Toraja berdasarkan surat keterangan dari lembang atau desa yang ada di Kecamatan Mengkendek tersebut sepenuhnya diurus dan dibayar oleh PT. Nelly Jaya

Pratama dengan kesepakatan bahwa pengusaha harus menjual kayunya kepada PT. Nelly Jaya Pratama.

B. Sistim Upah

Tenaga kerja pada kegiatan peneenan kayu hutan rakyat bagi pemilik lahan dan pengusaha pemanen kayu berasal dari dalam dan luar lingkungan keluarga, yaitu sanak saudara, atau masyarakat luas di Kecamatan Mengkendek. Tenaga kerja pada pemanenan kayu memiliki sistim upah yang jelas biarpun berasal dari lingkungan keluarga karena hasil produksi pemanenan kayu tidak dikonsumsi secara pribadi tetapi hasil produksi diperuntukkan untuk pasar yaitu di jual ke industri finis sebagai bahan baku.

Petani pemilik lahan atau pengusaha pemanen kayu yang sewa chainsaw, harga sewanya berdasarkan m^3 pohon yang ditebang. Untuk kelompok tenaga kerja yang bertugas sebagai pengupas, penyarad dan muat bongkar, yaitu orang-orang yang dipilih oleh pemilik chainsaw atau sanak keluarga yang dipanggil oleh petani atau pengusaha pemanen kayu hutan rakyat. Sistim upah yang digunakan oleh petani pemanen hutan rakyat dan pengusaha pemanen kayu adalah metode upah satuan yaitu upah dibayar pada tenaga kerja menurut jumlah produk yang dihasilkan per m^3 . Untuk mengangkut kayu dari tempat pengumpulan ke industri di gunakan truk. Biaya sewa truk berbeda sesuai dengan jarak dan kesepakatan antara petani atau pengusaha pemanen kayu hutan rakyat dengan pemilik truk biasanya untuk jarak 20 km biayanya Rp. 35.000/ m^3 dan untuk jarak 60-70 km/ m^3 biayanya Rp. 70.000/ m^3 .

Hasil wawancara dengan responden, pengusaha pemanen kayu di Kecamatan Mengkendek yang membeli kayu pinus dari pemilik lahan dalam bentuk pohon berdiri berdasarkan diameternya. Pohon yang berdiameter 30 cm ke atas pemilik hutan rakyat menjual kepada pengusaha Rp. 100.000 dan pohon yang berdiameter 25-29 cm petani menjual Rp.75.000.

Hasil wawancara dengan responden, diketahui bahwa petani pemilik hutan rakyat yang melakukan pemanenan sendiri atau pengusaha pemanen kayu yang menjual kayunya ke Industri Finir PT. Nelly Jaya Pratama di Kecamatan Mengkendek. Ukuran kayu yang di jual ditentukan oleh industri dalam bentuk log dengan diameter minimal 25 cm dan panjang 100 cm atau 125 cm. Harga jual kayu pinus yang ditawarkan industri finir PT Nelly Jaya Pratama dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Harga Jual Kayu yang Ditawarkan Industri Finir PT. Nelly Jaya Pratama kepada Petani atau Pengusaha

No	Panjang (cm)	Diameter (cm)	Harga (Rp/m ³)
1	100	20 – 29	300.000
		30 keatas	320.000
2	125	20 – 29	350.000
		30 keatas	370.000

C. Penerimaan

Penerimaan atau pendapatan kotor pada kegiatan pemanenan kayu hutan tanaman pinus dari hasil penjualan jumlah log yang dihasilkan. Dari hasil wawancara dengan responden, diketahui penerimaan yang diperoleh oleh pihak-pihak pada kegiatan pemanenan hutan rakyat dengan faktor produksi yang dimilikinya.

Tabel 8. Penerimaan Seluruh Pelaku Kegiatan Pemanenan Hutan Rakyat Di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.

No	Pekerjaan	Penerimaan (Rp/m ³)						
		Pemilik chainsaw	Pemilik truk	Operator chainsaw	Operat or truk	Tenaga kerja (pengupas, penyarad, muat-bongkar)	Pemilik modal	Pemilik lahan
1	Petani	35.000	55.000	-	-	50.000	230.000	-
2	Petani	-	-	20.000	15.000	60.000	275.000	-
3	Pengusaha	37.500	50.000	-	-	47.500	135.000	100.000
4	Pengusaha	35.000	60.000	-	-	50.000	130.000	75.000
5	Pengusaha	-	50.000	20.000	-	50.000	150.000	100.000
6	pengusaha	37.500	-	-	20.000	47.500	165.000	100.000
7	pengusaha	-	-	20.000	15.000	50.000	185.000	100.000

Tabel 8 menggambarkan perbandingan penerimaan seluruh pelaku pemanenan kayu hutan rakyat. Petani pemanen kayu pada nomor 1 selaku pemilik hutan rakyat, melakukan pemanenan dengan menyewa chainsaw dan truk, serta merekrut tenaga kerja pengupas, penyarad, dan muat bongkar secara kelompok dimana satu kelompok terdiri dari 6 orang yang berasal dari keluarga luas dan diupah dengan sistim metode upah satuan. Petani pemanen kayu menjual log pond ke industri dengan ukuran panjang 125 cm dan diameter di atas 30 cm.

Petani pemanen kayu pada Tabel 8 nomor dua sebagai pemilik hutan rakyat yang melakukan pemanenan memiliki faktor produksi chainsaw dan truk jadi hanya membayar upah operator. Untuk tenaga kerja pengupas, penyarad dan muat-bongkar secara kelompok dimana satu kelompok terdiri dari 7 orang yang berasal dari keluarga luas dan keluarga domestik yang memiliki metode upah satuan. Petani pemanen kayu menjual log pond ke industri dengan ukuran panjang 125 cm dan diameter di atas 30 cm.

Pengusaha pemanen kayu hutan rakyat pada Tabel 8 nomor tiga dalam melakukan kegiatan pemanenan terlebih dahulu membeli kayu dalam bentuk tegakan dari pemilik lahan dengan diameter di atas 30 cm. Dalam melakukan pemanenan pengusaha pemanen kayu menyewa chainsaw dan truk jadi operator untuk chainsaw dan truk ditentukan oleh pemiliknya. Untuk tenaga kerja pengupas, penyarad dan muat-bongkar secara berkelompok berasal dari keluarga luas pengusaha dan keluarga domestik yang memiliki metode upah satuan. Dimana pengusaha pemanen kayu menjual log pond ke industri dengan ukuran panjang 125 cm dan diameter di atas 30 cm.

Pengusaha pemanen kayu hutan rakyat pada Tabel 8 nomor empat dalam melakukan pemanenan terlebih dahulu membeli kayu dalam bentuk tegakan dari pemilik lahan dengan diameter 20-29 cm. Dimana Pengusaha pemanen kayu menyewa chainsaw dan truk serta merekrut tenaga kerja pengupas, penyarad dan muat bongkar secara kelompok yang berasal dari keluarga luas pengusaha dan keluarga domestik memiliki sistem upah satuan. Dimana pengusaha pemanen kayu

menjual log pond ke industri dengan ukuran panjang 125 cm dan diameter antara 20-29 cm.

Pengusaha pemanen kayu hutan rakyat pada Tabel 8 nomor lima terlebih dahulu membeli kayu dalam bentuk tegakan dari pemilik lahan dengan diameter di atas 30 cm. Dimana Pengusaha pemanen kayu menyewa truk dan memiliki chainsaw serta merekrut tenaga kerja pengupas, penyarad dan muat bongkar secara kelompok yang berasal dari keluarga luas dan keluarga domestik pengusaha, dimana memiliki sistem upah satuan.

Pengusaha pemanen kayu hutan rakyat pada Tabel 8 nomor enam sebelum melakukan pemanenan terlebih dahulu membeli kayu dalam bentuk tegakan dari pemilik lahan dengan diameter di atas 30 cm. Dimana pengusaha pemanen kayu memiliki truk dan menyewa chainsaw serta merekrut tenaga kerja pengupas, penyarad dan muat bongkar secara kelompok yang berasal dari keluarga domestik, dimana memiliki sistem upah satuan.

Pengusaha pemanen kayu hutan rakyat pada Tabel 8 nomor tujuh sebelum melakukan pemanenan terlebih dahulu membeli kayu dalam bentuk tegakan dari pemilik lahan dengan diameter di atas 30 cm. Dimana pengusaha pemanen kayu memiliki truk dan memiliki chainsaw serta merekrut tenaga kerja pengupas, penyarad dan muat bongkar secara kelompok yang berasal dari keluarga domestik, dimana memiliki sistem upah satuan. Pengusaha pada tabel 8 nomor lima sampai tujuh menjual log pond ke industri dengan ukuran panjang 125 cm dan diameter di atas 30 cm.

Tabel 8 yang menunjukkan penerimaan yang paling bagus adalah nomor 3 dan 4 dimana karakteristik hubungan produksi antara lain batas sosial antara keluarga inti-luas dan keluarga domestik, struktur hubungan produksi pseudo-hirarki dan sifat hubungan produksi pengusaha non eksploitatif. Sistem upah yang diterapkan pada tabel 8 semua sama yaitu metode upah satuan (Rp/m³). Penerimaan pada nomor 3 dan 4 tidak ada perbedaan penerimaan salah satu pihak yang sangat besar dari pihak lain sehingga mengurangi terjadinya kesenjangan sosial.

Dalam Penelitian Sari Gusti Sulaeman dengan judul Analisis Biaya dan Pendapatan Pemanenan Hutan Rakyat Untuk Bahan Baku Industri Finir PT. Nelly Jaya Pratama di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. didapat jumlah produk yang dihasilkan setiap tahun seperti yang tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Panen Log Pinus dari 10 Pemanen Kayu Hutan Rakyat Selama Setahun di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

No.	Nama Pemanen	Volume yang Di Hasilkan (m ³)
1.	Lukas	1040
2.	Hendrik Sanlollo	1170
3.	Iwan	624
4.	Yohanis	780
5.	Marten	780
6.	Lukas Kumombong	624
7.	Ambe Liu'	520
8.	Fransiskus	416
9.	Asri	832
10.	Yunus Taruk	1170
	Jumlah	7956

Sumber : Data Primer, 2008

D. Cara Produksi Komersial dan Hubungan Produksi

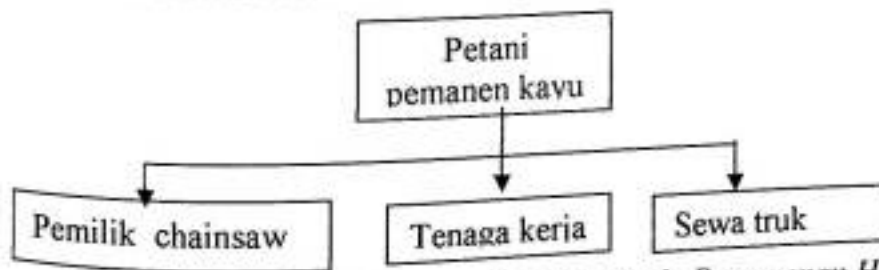
1. Cara Produksi Komersial

Cara produksi komersial terjadi pada produksi pemanenan kayu hutan rakyat di Kecamatan Mengkendek. Dimana produksi berorientasi terhadap pasar dan bukan dikonsumsi sendiri. Tenaga kerja yang terlibat didalamnya berasal dari keluarga inti-luas dan keluarga domestik yang memperoleh imbalan kerja atau upah maka struktur hubungan yang teramati secara "Pseudo-hirarki" karena seperti ada dua status yaitu atasan dan bawahan padahal dalam kenyataannya tidak ada yang menganggap dirinya sebagai majikan atau buruh. Sifat hubungan produksi yang teramati pada cara produksi komersial tidak eksploitasi dan gejala eksploitatif surplus oleh pemilik modal, tetapi tidak setegas eksploitatif surplus oleh majikan dalam produksi kapitalis.

2. Hubungan Produksi

Hubungan produksi yang terjadi pada perusahaan pemanenan hutan rakyat di Kecamatan Mengkendek ada enam pola, yaitu :

- a. Pola 1. Hubungan Produksi pada Pemanenan Hutan Rakyat jika Petani Tidak Memiliki Fasilitas Penebangan.



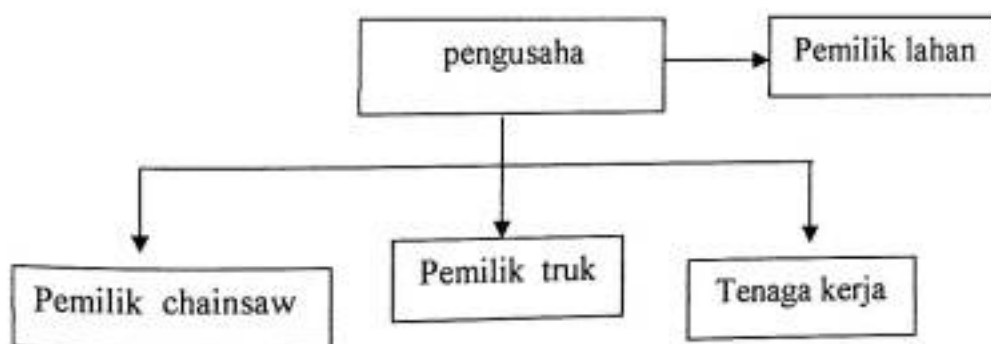
Gambar 2. Pola 1 Hubungan Produksi pada Pemanenan Hutan Rakyat di Kecamatan Mengkendek

- b. Pola 2. Hubungan Produksi pada Pemanenan Hutan Rakyat jika Petani memiliki Fasilitas Penebangan.



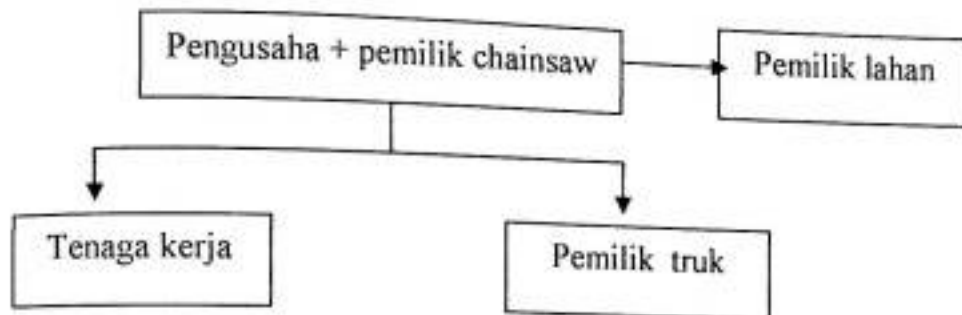
Gambar 3. Pola 2 Hubungan Produksi pada Pemanenan Hutan Rakyat di Kecamatan Mengkendek

- c. Pola 3. Hubungan Produksi pada Pemanenan Hutan Rakyat jika Pengusaha tidak memiliki Fasilitas Penebangan



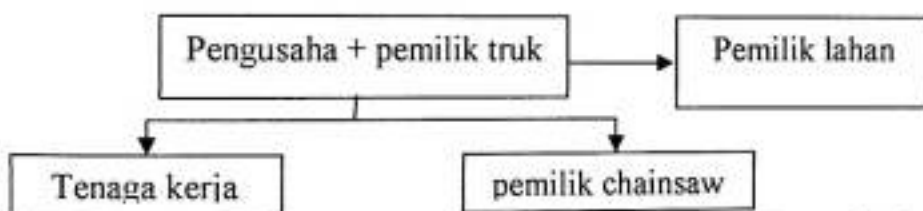
Gambar 4. Pola 3 Hubungan Produksi pada Pemanenan Hutan Rakyat di Kecamatan Mengkendek

- d. Pola 4. Hubungan Produksi pada Pemanenan Hutan Rakyat jika Pengusaha memiliki salah satu Fasilitas Penebangan



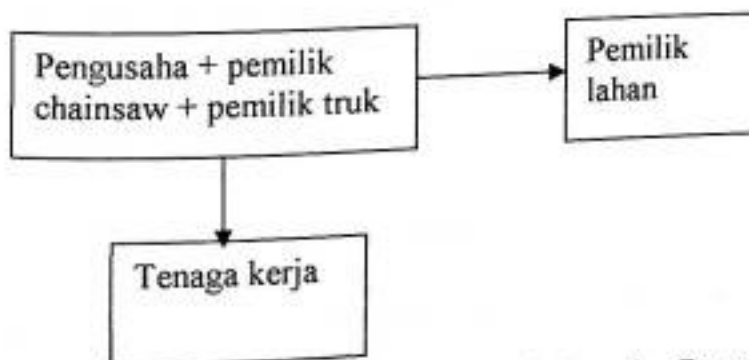
Gambar 5. Pola 4 Hubungan Produksi pada Pemanenan Hutan Rakyat di Kecamatan Mengkendek.

- e. Pola 5. Hubungan Produksi pada Pemanenan Hutan Rakyat jika Pengusaha memiliki salah satu Fasilitas Penebangan



Gambar 6. Pola 4 Hubungan Produksi pada Pemanenan Hutan Rakyat di Kecamatan Mengkendek.

- f. Pola 6. Hubungan Produksi pada Pemanenan Hutan Rakyat jika Pengusaha memiliki Fasilitas Penebangan



Gambar 7. Pola 4 Hubungan Produksi pada Pemanenan Hutan Rakyat di Kecamatan Mengkendek.

Pola 1, menggambarkan hubungan petani pemanen kayu sebagai pemilik lahan dalam melakukan pemanenan dengan pemilik chainsaw, pemilik truk dan tenaga kerja. Pemilik lahan yang mengupah tenaga kerja, dan menyewa chainsaw serta truk. Hubungan produksi pada pola 1 melibatkan banyak pihak dimana perbandingan penerimaan semua pelaku yang terlibat pada Pola 1 dapat dilihat pada Tabel 8 yaitu petani Lukas dan Hendrik. Pola 2, menggambarkan petani hutan rakyat melakukan pemanenan dengan memiliki faktor produksi chainsaw dan truk jadi petani pemilik hutan rakyat mengupah operator dan tenaga kerja pengupas, penyarad dan muat bongkar. Hubungan produksi pola 2 tidak melibatkan banyak pihak karena hanya melibatkan petani pemanen kayu sebagai pemilik lahan sekaligus pemilik faktor produksi dengan tenaga kerja.

Pola 3 menggambarkan hubungan antara pengusaha pemanen kayu dengan pemilik lahan, pemiliki chainsaw, pemilik truk serta tenaga kerja pengupas, penyarad dan muat bongkar. Pengusaha yang mengeluarkan biaya dalam kegiatan pemanenan untuk membeli kayu dalam bentuk tegakan, menyewa truk dan chainsaw, serta mengupah tenaga kerja. Jadi pengusaha merupakan atasan dan pemilik faktor produksi merupakan bawahan. Sistem upah yang digunakan pengusaha adalah metode upah satuan (Rp/m^3).

Pola 4 menggambarkan hubungan antara pengusaha, pemilik truk, pemilik lahan serta tenaga kerja pengupas, penyarad dan muat bongkar. Pengusaha sebagai pemilik modal juga memiliki chainsaw dan mengeluarkan biaya untuk menyewa truk, membeli kayu dalam bentuk tegakan dari pemilik lahan, mengupah

operator chainsaw dan tenaga kerja pengupas, penyarad dan muat bongkar. Sistem upah yang digunakan pengusaha adalah metode upah satuan (Rp/m³).

Pola 5 menggambarkan hubungan antara pengusaha, pemilik chainsaw, pemilik lahan serta tenaga kerja pengupas, penyarad dan muat bongkar. Pengusaha sebagai pemilik modal juga memiliki truk dan mengeluarkan biaya untuk menyewa truk, membeli kayu dalam bentuk tegakan dari pemilik lahan, mengupah operator truk dan tenaga kerja pengupas, penyarad dan muat bongkar. Sistem upah yang digunakan pengusaha adalah metode upah satuan (Rp/m³).

Pola 6 menggambarkan hubungan antara pengusaha, pemilik lahan dan tenaga kerja pengupas, penyarad dan muat bongkar. Pengusaha sebagai pemilik modal mengeluarkan biaya untuk membeli kayu dalam bentuk tegakan dari pemilik lahan, mengupah operator chainsaw, operator truk dan tenaga kerja pengupas, penyarad dan muat bongkar.

Hubungan produksi dan cara produksi komersial dari ke enam pola yang ada di Kecamatan Mengkendek dapat dilihat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Hubungan Produksi dalam Pemanenan Kayu Hutan Rakyat di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja

Pola hubungan produksi	Batas Sosial Hub. Produksi	Struktur Hub. Produksi	Sifat Hub. Produksi
1	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga domestik antara pemilik chainsaw, truk dan petani - Keluarga luas antara petani dengan tenaga kerja pengupas, penyarad dan muat bongkar 	Pseudo hirarkis	Non eksploitasi
2	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga luas antara petani dengan tenaga kerja (pengupas, penyarad dan muat bongkar) - Keluarga luas antara petani dan operator chainsaw atau truk 	Pseudo hirarkis	Non eksploitasi
3	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga domestik antara pemilik lahan, pemilik chainsaw, pemiliki truk dan pengusaha - keluarga luas pengusaha dan tenaga kerja 	Pseudo hirarkis	Non eksploitasi
4	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga domestik antara pemilik lahan, pemilik truk dan pengusaha - Keluarga luas antara pengusaha dan tenaga kerja - Keluarga inti antara pengusaha dan Operator chainsaw 	Pseudo hirarkis	Non eksploitasi
5	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga domestik antara pemilik lahan, pemilik chainsaw dan pengusaha - Keluarga luas antara pengusaha dan tenaga kerja - Keluarga inti antara pengusaha dan Operator truk 	Pseudo hirarkis	Non eksploitasi
6	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga domestik antara pemilik lahan, tenaga kerja dan pengusaha - Keluarga luas antara pengusaha dengan operator chainsaw dan truk 	Pseudo hirarkis	Non eksploitasi

Pola 1 pada Tabel 10 menggambarkan hubungan produksi dengan cara produksi komersial. Batas sosial hubungan produksi antara pemilik chainsaw, pemilik truk dan petani adalah keluarga domestik sedangkan tenaga kerja pengupas, penyarad dan muat-bongkar adalah keluarga luas. Keluarga luas dan keluarga domestik yang terlibat pada kegiatan pemanenan hutan rakyat memperoleh imbalan kerja atau upah, maka struktur hubungan produksi yang teramati "pseudo hirarki" karena dalam kegiatan pemanenan tersebut ada dua status yang berbeda yaitu pemilik lahan sekaligus petani pemanen kayu sebagai atasan dan anggota keluarga luas dan keluarga domestik sebagai bawahan, meskipun dalam kegiatan pemanenan tidak nampak berbeda jelas seperti antara atasan dan bawahan pada organisasi perusahaan formal. Sifat hubungan produksi pada cara produksi komersial dimana petani sebagai pemilik modal bersifat tidak eksploitasi terhadap tenaga kerja yang digunakannya, hal ini dapat dilihat pada besarnya penerimaan yang diperoleh seluruh pelaku pemanen hutan rakyat seperti yang digambarkan pada Tabel 8.

Pola 2 pada Tabel 10 menggambarkan hubungan produksi dengan cara produksi komersial. Batas sosial hubungan produksi antara operator chainsaw, operator truk, tenaga kerja (pengupas, penyarad, muat-bongkar) dan petani adalah keluarga luas. Dimana dalam kegiatan pemanenan hutan rakyat keluarga luas yang terlibat memperoleh imbalan kerja atau upah maka struktur hubungan produksi yang teramati "pseudo-hirarki" karena dalam kegiatan pemanenan tersebut ada dua status yang berbeda yaitu pemilik lahan sekaligus petani pemanen kayu sebagai atasan dan

anggota keluarga luas sebagai bawahan, meskipun dalam kegiatan pemanenan tidak nampak berbeda jelas seperti antara atasan dan bawahan pada organisasi perusahaan formal. Sifat hubungan produksi pada cara produksi komersial dimana petani sebagai pemilik modal bersifat tidak eksploitasi terhadap tenaga kerja yang digunakannya, hal ini dapat dilihat pada besarnya penerimaan seluruh pelaku pemanen hutan rakyat yang terjadi pada hubungan produksi Pola 2 di Tabel 8.

Pola 3 Tabel 10 menggambarkan hubungan produksi dengan cara produksi komersial. Batas sosial hubungan produksi antara pemilik lahan, pemilik chainsaw, pemilik truk dan pengusaha adalah keluarga domestik sedangkan tenaga kerja (pengupas, penyarad dan muat-bongkar) dan pengusaha adalah keluarga luas. Keluarga luas dan keluarga domestik yang terlibat pada kegiatan pemanenan hutan rakyat memperoleh imbalan kerja atau upah maka struktur hubungan produksi yang teramati "pseudo hirarki" karena dalam kegiatan pemanenan tersebut ada dua status yang berbeda yaitu pengusaha pemanen kayu sebagai atasan dan anggota keluarga luas dan keluarga domestik sebagai bawahan, meskipun dalam kegiatan pemanenan tidak nampak berbeda jelas seperti antara atasan dan bawahan pada organisasi perusahaan formal. Sifat hubungan produksi pada cara produksi komersial dimana pengusaha sebagai pemilik modal bersifat tidak eksploitasi terhadap tenaga kerja yang digunakannya, hal ini dapat dilihat pada besarnya penerimaan seluruh pelaku pemanen hutan rakyat yang terjadi pada hubungan produksi Pola 3 di Tabel 8.

Pola 4 Tabel 10 menggambarkan hubungan produksi dengan cara produksi komersial. Batas sosial hubungan produksi keluarga domestik antara pemilik lahan, pemilik truk dan pengusaha, keluarga luas antara tenaga kerja (pengupas, penyarad dan muat-bongkar) dengan pengusaha dan keluarga inti antara operator chainsaw dengan pengusaha. Keluarga luas, keluarga domestik dan keluarga inti yang terlibat pada kegiatan pemanenan hutan rakyat memperoleh imbalan kerja atau upah maka struktur hubungan produksi yang teramati "pseudo hirarki" karena dalam kegiatan pemanenan tersebut ada dua status yang berbeda yaitu pengusaha pemanen kayu sebagai atasan dan anggota keluarga inti-luas dengan keluarga domestik sebagai bawahan, meskipun dalam kegiatan pemanenan tidak nampak berbeda jelas seperti antara atasan dan bawahan pada organisasi perusahaan formal. Sifat hubungan produksi pada cara produksi komersial dimana pengusaha sebagai pemilik modal bersifat tidak eksploitasi terhadap tenaga kerja yang digunakannya, hal ini dapat dilihat pada besarnya penerimaan seluruh pelaku pemanen hutan rakyat yang terjadi pada hubungan produksi Pola 4 di Tabel 8.

Pola 5 Tabel 10 menggambarkan hubungan produksi dengan cara produksi komersial. Batas sosial hubungan produksi keluarga domestik antara pemilik lahan, pemilik chainsaw dan pengusaha. Keluarga luas antara tenaga kerja (pengupas, penyarad dan muat-bongkar) dengan pengusaha. Keluarga inti antara operator chainsaw dengan pengusaha. Keluarga inti-luas dan keluarga domestik yang terlibat pada kegiatan pemanenan hutan rakyat memperoleh imbalan kerja atau upah maka struktur hubungan produksi yang teramati "pseudo hirarki" karena dalam kegiatan

pemanenan tersebut ada dua status yang berbeda yaitu pengusaha pemanen kayu sebagai atasan dan anggota keluarga inti-luas dengan keluarga domestik sebagai bawahan, meskipun dalam kegiatan pemanenan tidak nampak berbeda jelas seperti antara atasan dan bawahan pada organisasi perusahaan formal. Sifat hubungan produksi pada cara produksi komersial dimana pengusaha sebagai pemilik modal bersifat tidak eksploitasi terhadap tenaga kerja yang digunakannya, hal ini dapat dilihat pada besarnya penerimaan seluruh pelaku pemanen hutan rakyat yang terjadi pada hubungan produksi Pola 5 di Tabel 8

Pola 6 Tabel 10 menggambarkan hubungan produksi dengan cara produksi komersial. Batas sosial hubungan produksi keluarga domestik antara pemilik lahan, tenaga kerja (pengupas, penyarad dan muat-bongkar) dan pengusaha. Keluarga luas antara pengusaha dengan operator chainsaw dan truk. Keluarga luas dan keluarga domestik yang terlibat pada kegiatan pemanenan hutan rakyat memperoleh upah maka struktur hubungan produksi yang teramati "pseudo hirarki" karena dalam kegiatan pemanenan tersebut ada dua status yang berbeda yaitu pengusaha pemanen kayu sebagai atasan dan anggota keluarga inti-luas dengan keluarga domestik sebagai bawahan, meskipun dalam kegiatan pemanenan tidak nampak berbeda jelas seperti antara atasan dan bawahan pada organisasi perusahaan formal. Sifat hubungan produksi pada cara produksi komersial dimana pengusaha sebagai pemilik modal bersifat tidak eksploitasi terhadap tenaga kerja yang digunakannya, hal ini dapat dilihat pada besarnya penerimaan seluruh pelaku pemanen hutan rakyat yang terjadi pada hubungan produksi Pola 6 di Tabel 8.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil sistem upah dan hubungan produksi pemanenan kayu hutan rakyat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem upah yang digunakan petani pemanen kayu dan pengusaha pemanen kayu adalah metode upah satuan (Rp/m^3)
2. Penerimaan yang paling besar diperoleh petani sebagai pemilik lahan, truk dan chainsaw sebesar Rp.275.000
3. Sistem penjualan produk kayu di Kecamatan Mengkendek secara komersial, dimana hasil pemanenan dijual ke Industri Finir PT. Nelly Jaya Pratama
4. Karakteristik hubungan produksi pemanenan hutan rakyat berciri :
 - a) Batas sosial hubungan produksi adalah :
 - i. Keluarga domestik.
 - ii. Keluarga inti-luas
 - b) Struktur hubungan produksi pada pemanenan hutan rakyat secara pseudo-hirarki.
 - c) Sifat hubungan produksi petani pemanen kayu dan pengusaha non eksploitatif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. pola hubungan produksi yang sebaiknya diadopsi untuk penerimaan yang lebih tinggi kepada semua pihak sehingga tidak terjadi perbedaan penerimaan yang begitu besar oleh salah satu pihak pelaku pemanenan yaitu pola 3.
2. Sebaiknya dibentuk koperasi petani untuk membeli fasilitas penebangan bersama

DAFTAR PUSTAKA

- Artoyo, A.R., 1986. *Tenaga Kerja Perusahaan Menurut Pengertian dan Peranannya*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Berkah, I., 2002. *Pengantar Ekonomi-Politik*. <http://www.geocities.com>
- Departemen Kehutanan, 1996. *Pemungutan Hasil Hutan (Jilid II)*. SKMA, Makassar.
- Departemen Kehutanan. 1999. *Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. PT. Mitra Info, Jakarta
- _____, 2002. *Informasi Tentang Pemanenan Hutan Hak*. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999. *Panduan Kehutanan Indonesia*. Koperasi Kehutanan departemen Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta.
- Fauzi, Drs., 1995. *Kamus Akuntansi Praktis*. Indah, Surabaya.
- Kusumedi P., 2003. *Hutan Rakyat Belajar dari Kearifan Rakyat*. Eboni Nomor 11 Desember 2003. Penerbit Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Sulawesi. Makassar.
- Lukito, M., 1990. *Standar Produksi Penyaradan Kayu dengan Traktor Komatsu D80A-12 di Areal HPH PT. Rante Mario Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi (tidak dipublikasikan) Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Rahayu, S. S., 1994. *Standar Produksi Pemuatan Log Dengan Loader Clark 175 B di Areal HPH PT. International Timber Corporation Indonesia di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur*. Skripsi (tidak dipublikasikan) Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Rostiati, 1990. *Produktivitas Pemabagian Batang Kayu Meranti dan Kayu Palapi di Areal HPH PT Rante Mario*. Skripsi (tidak dipublikasikan) Jurusan Kehutanan, Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang.
- Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, 2006. *Insentif dan Disentif Tata Usaha Kayu Hutan Rakyat*. FAHUTAN UGM. Yogyakarta.

- Sitorus, M.T., 1999. *Pembentukan Golongan Pengusaha Temun dalam Masyarakat Batak Toba*. Disertasi pada Program S3 Sosiologi Pedesaan PPS IPB (tidak dipublikasikan)
- Soekartawi, 1986. *Ilmu Usaha Tani*. Penerbit UI Press, Jakarta.
- _____, 1990. *Teori Ekonomi Produksi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soebroto Bambang dan Hariadi Bambang, 1984. *Dasar-dasar Akuntansi*. Liberty Yogyakarta.
- Suharjito, D., A Khan, W.A. Djatmiko, M.T. Sirait, dan S. Evelyn, 2000. *karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasiskan Masyarakat*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Suhartana dan Dulsalam, 1994. *Peranan Penebangan dan Penyaradan Terhadap Keberadaan Tegakan Tinggal di Suatu Perusahaan Hutan di Riau*. Jurnal Penelitian dan Pengebangan Kehutanan. Jakarta.
- Suseno, F.M., 1999. *Pemikiran Karl Marx : Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revosionisme*. Penerbit Gramedia. Jakarta.
- Swastha, B. dan Ibnu, S.W., 1988. *Pengantar Bisnis Modern Edisi ke-3*. Liberti. Yogyakarta.
- Tempointeraktif.com, 2004. *PP RI No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi*. Prn, 200403329-29,id.html.
- Umar, Husein, 1998. *Riset Sumber Daya Manusia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wackerman, A.E., 1949. *Harvesting Timber crops*. Mc. Graw – Hill Book Company, New York.

IV. Sistem Upah Tenaga Kerja

1. Dalam melakukan pengupahan kepada tenaga kerja bapak menggunakan metode ?
 - a. Upah langsung
 - b. Gaji
 - c. Upah satuan
 - d. Komisi
 - e. Premi shift kerja
2. Berapa besar upah tenaga kerja pada setiap pola pemanenan hutan rakyat dari metode pengupahan yang bapak gunakan
 - a. Penebangan
 - b. Penyaradan
 - c. Pembagian batang
 - d. Pengangkutan kayu

V. Pendapatan

1. Apakah bapak jual kayu dalam bentuk pohon berdiri? Berapa harganya?
2. Apakah bapak menjual kayu dalam bentuk sotimen? Diameter berapa? Panjang berapa? Ketebalan berapa? Dan harganya berapa?

Lampiran 2. Perbandingan Penerimaan petani hutan rakyat yang sewa chainsaw dan truk dengan pelaku pemanen kayu lainnya

Tabel 21. Pak lukas menjual kayu dengan panjang 125 cm dan diameter di atas 30 cm

Penerimaan (Rp/m ³)			
Sewa chainsaw + operator	Tenaga kerja (pengupas, penyarad dan muat-bongkar)	Sewa truk	Pak lukas
35.000	50.000	50.000	235.000

Tabel 22. Pak hendrik menjual kayu dengan panjang 125cm dan diameter di atas 30 cm

Penerimaan (Rp/m ³)			
Sewa chainsaw +operator	Tenaga kerja (pengupas, penyarad dan muat-bongkar)	Sewa truk	Pak hendrik
35.000	50.000	60.000	225.000

Lampiran 3. Perbandingan Penerimaan Pemilik petani hutan rakyat yang memiliki chainsaw dan truk kayu lainnya

Tabel 23. Ambe'liu menjual kayu dengan panjang 125 cm dan diameter di atas 30 cm

penerimaan (Rp/m ³)			
Operator chainsaw	Tenaga kerja (pengupas, penyarad, muat bongkar)	Operator truk	Ambe'liu
20.000	60.000	15.000	275.000

Lampiran 4. Perbandingan penerimaan Pengusaha yang menyewa chainsaw dan truk dengan pelaku pemanen kayu lainnya

Tabel 24. Iwan menjual kayu ke industri dengan panjang 125 cm dan diameter di atas 30 cm

Penerimaan (Rp/m ³)				
Sewa chainsaw+operator	Tenaga kerja	Sewa truk	Pemilik lahan	Pengusaha
35.000	45.000	50.000	100.000	140.000

Tabel 25. Lukas kumombong menjual kayu ke industri dengan ukuran panjang 125 cm dan diameter di atas 30 cm

Penerimaan (Rp/m ³)				
Sewa chainsaw+operator	Tenga kerja	Sewa truk	Pemilik lahan	Pengusaha
40.000	50.000	50.000	100.000	130.000

Tabel 26. Asri menjual kayu ke industri dengan ukuran panjang 125 cm dan diameter 20 cm sampai 29 cm

Penerimaan (Rp/m ³)				
Sewa chainsaw +operator	Tenaga kerja	Sewa truk	Pemilik lahan	Pengusaha
35.000	50.000	60.000	75.000	130.000

Lampiran 5. Perbandingan penerimaan Pengusaha yang memiliki chainsaw dan menyewa truk dengan pelaku pemanen kayu lainnya

Tabel 27. Marthen menjual kayu ke industri dengan ukuran panjang 125 cm dan diameter di atas 30 cm

penerimaan (Rp/m ³)				
Operator chainsaw	Tenaga kerja	Sewa truk	Pemilik lahan	Pengusaha
20.000	50.000	50.000	100.000	150.000

Lampiran 6. Perbandingan Penerimaan Pengusaha yang memiliki truk dan menyewa chainsaw dengan pelaku pemanen kayu lainnya

Tabel 28. Pak yunus menjual kayu ke industri dengan ukuran panjang 125 cm dan diameter di atas 30 cm

Penerimaan (Rp/m ³)				
Sewa chainsaw + operator	Tenaga kerja	Operator truk	Pemilik lahan	Pengusaha
35.000	50.000	20.000	100.000	165.000

Tabel 29. Fransiskus menjual kayu ke industri dengan ukuran panjang 125 cm dan diameter di atas 30 cm

Penerimaan (Rp/m ³)				
Sewa chainsaw + operator	Tenaga kerja	Operator truk	Pemilik lahan	Pengusaha
40.000	45.000	20.000	100.000	165.000

Lampiran 7. Perbandingan Penerimaan Pengusaha yang memiliki chainsaw dan truk dengan pelaku pemanen kayu lainnya

Tabel 30. Yohanis menjual kayu ke industri dengan panjang 125 c m dan diameter di atas 30 cm

Operator chainsaw	Penerimaan (Rp/m ³)			
	Tenaga kerja	Operator truk	Pemilik lahan	Pengusaha
20.000	50.000	15.000	100.000	185.000

Lampiran 8. Dokumentasi



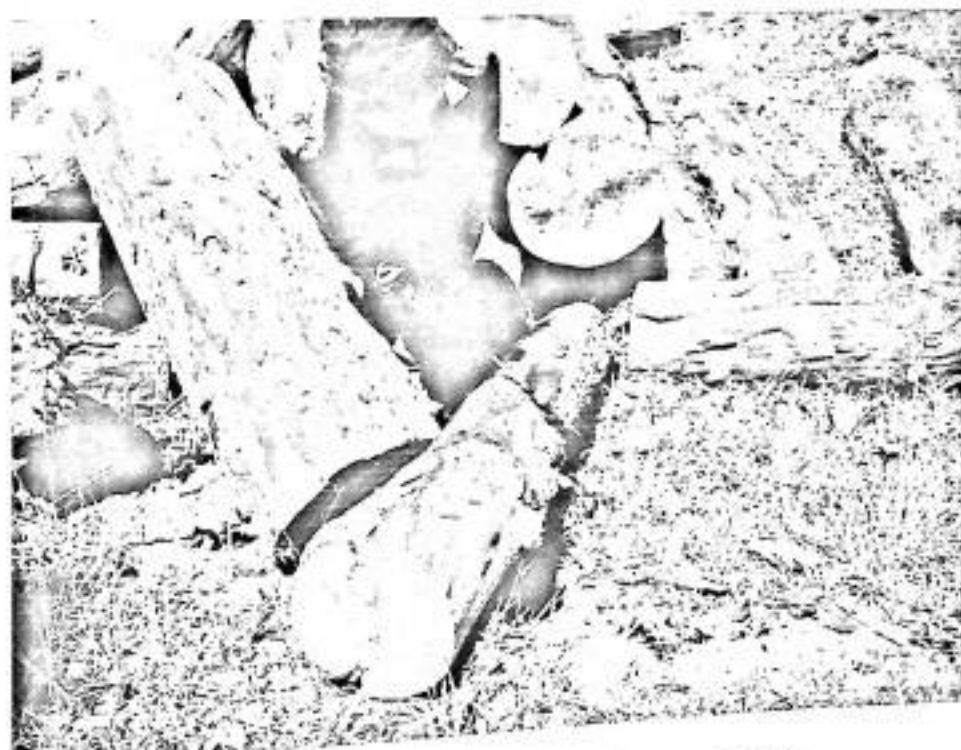
Gambar 1. penebangan



Gambar 2. Pembagian batang



Gambar 3. Pengupasan dengan *bilah* (masyarakat Toraja menyebut pesese)



Gambar 4. Pengupasan dengan parang



Gambar 5. pengeringan



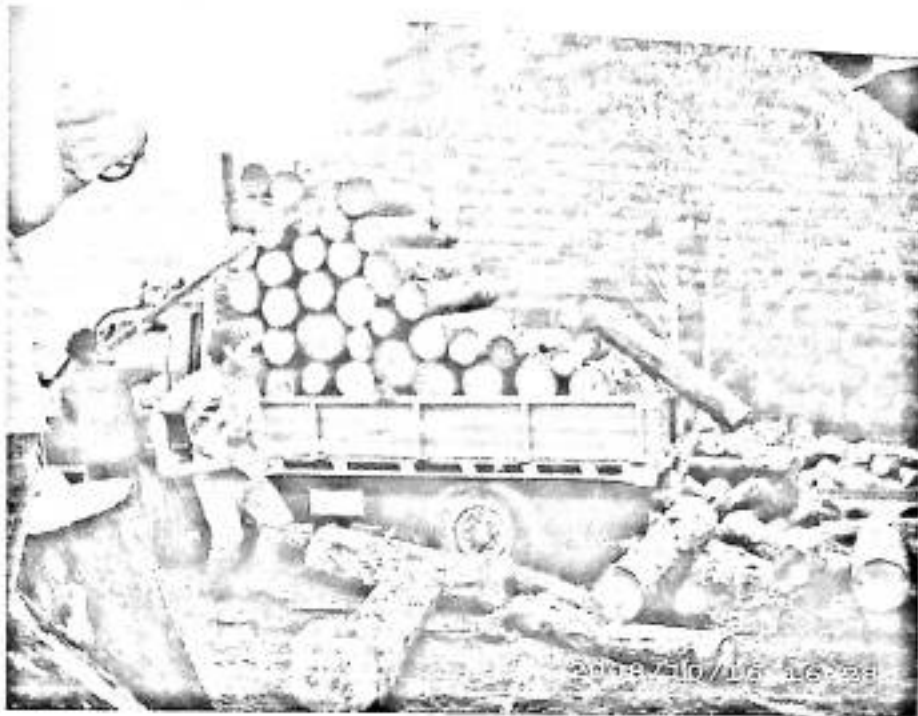
Gambar 6. Penyaradan dengan cara dipikul



Gambar 7. Penyaradan dengan cara diguling



Gambar 8. pemuatan



Gambar 9. pembongkaran



Gambar 10. Tempat pengumpulan (TPn)



Gambar 11. Pengambilan Kuisioner